

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2020 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran tiap Perangkat Daerah untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Prioritas program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kinerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2020 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maksimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat (a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

PPAS Tahun 2020 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman

penyusunan RAPBD Tahun 2020 dan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2020 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA Perangkat Daerah),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2020,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2020.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
24. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900/02/4139/2019 dan 170/13.1/2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/

KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada Perangkat Daerah, serta plafon sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upaya yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain;
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pertumbuhan sumber pendapatan daerah tersebut diperoleh proyeksi kapasitas sekaligus target pendapatan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.934.223.369.000,00 yang terdiri dari PAD Rp.441.204.916.000,00 (15,04%), Dana Perimbangan Rp.1.745.286.534.000,00 (59,48%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.747.731.919.000,00 (25,48%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.136.475.102.020,00 (30,93%), Retribusi Daerah Rp.31.168.648.000,00 (7,06%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.15.355.000.000,00 (3,48%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.258.206.166.000,00 (58,52%). Sementara proyeksi Dana

Perimbangan terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sebesar Rp.27.870.017.000,00 (1,60%), Dana Alokasi Umum Rp.1.233.810.455.000,00 (70,69%), dan Dana Alokasi Khusus Rp.483.606.062.000,00 (27,71%). Sedangkan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah Rp.151.446.800.000,00 (20,25%), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.200.326.750.000,00 (26,79%), Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp.20.000.000.000,00 (2,67%), Dana Insentif Daerah Rp.35.000.000.000,00 (4,68%) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat Rp.340.958.369.000, 00 (45,60%). Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2019	PENDAPATAN PPAS 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	416.867.970.000	441.204.916.000	24.336.946.000	5,84
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	104.828.000.000	136.475.102.000	31.647.102.000	30,19
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.168.648.000	31.168.648.000	5.000.000.000	19,11
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.355.000.000	15.355.000.000	-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	270.516.322.000	258.206.166.000	(12.310.156.000)	(4,55)
1.2	Dana Perimbangan	1.629.809.921.000	1.745.286.534.000	115.476.613.000	7,09
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.542.874.000	27.870.017.000	1.327.143.000	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000	1.233.810.455.000	35.248.814.000	2,94
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	404.705.406.000	483.606.062.000	78.900.656.000	19,50
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	747.085.592.000	747.731.919.000	646.327.000	0,09
1.3.1	Pendapatan Hibah	143.846.800.000	151.446.800.000	7.600.000.000	5,28
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	191.496.814.000	200.326.750.000	8.829.936.000	4,61
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	26.206.600.000	20.000.000.000	(6.206.600.000)	(23,68)
1.3.6	Dana Insentif Daerah	44.577.009.000	35.000.000.000	(9.577.009.000)	(21,48)
1.3.7	Dana Desa dari Pem. Pusat	340.958.369.000	340.958.369.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.793.763.483.000	2.934.223.369.000	140.459.886.000	5,03

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2020 didasarkan oleh prioritas pembangunan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2020 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2020 yang diatur dalam Permendagri dan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal.

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

No	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan social	2. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan 3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja
3	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusvitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	5. Stabilitas pertahanan dan keamanan
4	4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	2. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah	2. Konektivitas dan pemerataan 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
5	5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
6	6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja

Prioritas pembangunan 2020 dengan sasaran dan target kinerja yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	45,25	50,1	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	Sekretariat Daerah
3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	Inspektorat
4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	Sekretariat Daerah
5	Pertumbuhan ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	Sekretariat Daerah
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	Sekretariat Daerah
7	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	Sekretariat Daerah
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	Sekretariat Daerah
11	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	Sekretariat Daerah
12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	Sekretariat Daerah
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
	APM PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	24,17	25,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,24	32,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	0,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	0,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Kelas tingkat SD	Rasio; Tahunan	1:0,3	1:0,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Mapel tingkat SMP	Rasio; Tahunan	1:1:32	1:1:31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	91,65	93,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	87,21	89,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN				
	persentase puskesmas dan labkesda terakreditasi	Fasyankes; Tahunan; Referensi : Renstras Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Th. 2008			
	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standart	Akumulatif; Tahunan; Referensi Renstra 2014-2019 dan UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase nakes/fasyankes yang mendapat rekomendasi perijinan	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	0	68	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Prov.	35	40	Dinas Kesehatan
	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	80	81	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	10	11	Dinas Kesehatan
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th. 2017	90	94	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita PTM yang terlayani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : PMK No.45 th 2014, PMK No.150 th. 2010, PMK No. 77 th. 2014	27	100	Dinas Kesehatan
	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : UU No.13 th 2008, PMK No.15 th 2016	32,80	100	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup; Tahunan; Permendagri 86/2017, SDGs	56	52	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup; Tahunan; SDGs	7,86	7,47	Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita	per 1000 kelahiran hidup; Tahunan; Permendagri	8,39	7,97	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		86/2017, SDGs			
	Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 th. 2008	73,2	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase mutu dan etika sesuai standar	PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	71,8	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 tahun 2008	74,3	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	PP PPNI tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	72,2	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persen; tahunan; Permenkes no 129/MENKES/SK /II/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	79,1	80	RSUD dr Soeselo
	Persentase penunjang non medis sesuai standar	Persen; tahunan; Permenkes nomor 56 tahun 2016	90	90	RSUD dr Soeselo
	Persentase Layanan Rumah Sakit sesuai Standar	Persen; Tahunan; Kepmenkes No. 129 Tahun 2008	89	90	RSUD Suradadi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	62,42	70,02	DPU
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	30	40	DPU
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif	67,11	75,11	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	56,39	60	DPU
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85	86	DPU
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Tahunan	86,23	88,00	Dinas Perkimtaru
	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Tahunan	88,70	90,00	Dinas Perkimtaru
	Persentasen Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen; Tahunan	77,00	60,00	
	Persentasen Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen; Tahunan	12,10	15,00	Dinas Perkimtaru
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76	80	Satpol PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan; IKU; SPM	70	74	Satpol PP
	Rasio Linmas per RT	Persen; Tahunan; IKU	1	1,07	Satpol PP
	Persentase Linmas Terlatih	Persen; Tahunan; IKU	7	8	Satpol PP
	Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58	66	Satpol PP
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	60,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	60,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	70,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	65,59	0	Kesbangpol
	Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	76,60	0	Kesbangpol
	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	0	Kesbangpol
	Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; tahunan; SPM	1.72	2.44	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persen; tahunan; SPM	20.00	44.00	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; tahunan; SPM	85.71	90.19	BPBD
	Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Persen; tahunan; SPM	30.00	50.00	BPBD
	Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	13.59	21.74	BPBD
	Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	33,33	58.33	BPBD
6	SOSIAL				
	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,34	84,34	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,08	90,08	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80,91	82,46	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,64	97,87	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
	AKAN	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	653	660	Dinas Perinaker
	AKAD	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	231	246	Dinas Perinaker
	AKL	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	120	140	Dinas Perinaker
	Presentase penyelesaian hubungan industrial	Persen, Tahunan, IKU OPD	40	50	Dinas Perinaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen, Tahunan, IKU OPD	70	72	DP3AP2KB
	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, IKU OPD	50	55	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
3	PANGAN				
	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/O T.140/12/2010	80	81	Dinas Tan KP
4	PERTANAHAN				
	Persentase luas lahan besertifikat	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	52,22	57,37	Dinas Perkimtaru
5	LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	Dinas LH
	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	Dinas LH
	indeks kualitas air	nilai; Tahunan; IKU OPD	61,00	72,00	Dinas LH
	indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,00	77,50	Dinas LH
	indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	59,21	Dinas LH
	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65	55	Dinas LH
	Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Dinas LH
6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	persentase penduduk ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80	Dinas Dukcapil
	persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,08	90	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43	90	Dinas Dukcapil
	Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85	40	Dinas Dukcapil
	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persen; Tahunan; IKU OPD	20	30	Dinas Dukcapil
	Persentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Persen; Tahunan; IKU OPD	9,28	20	Dinas Dukcapil
	Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	85	85	Dinas Dukcapil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persentase. Kumulatif. Permendagri 112	50,15	58	Dinas Permasdes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015			
	Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15	25	Dinas Permasdes
	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.	35 Bumdes	25	Dinas Permasdes
	Persentase Pengembangan Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100	Dinas Permasdes
	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Pengemban gan Kawasan Pedesaan.	50	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan	10	25	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)	5	25	Dinas Permasdes
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,28	0,26	DP3AP2KB
	Persentase Ketahanan keluarga	Prosen, Tahunan, IKU OPD	45	48	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,14	69,81	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN				
	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	34,49	43	Dinas Perhubungan
	Persentase Rekomendasi Andalalin	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58,33	20	Dinas Perhubungan
	Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	38,92	35	Dinas Perhubungan
	Persentase Lokasi Titik Parkir		57	62	Dinas Perhubungan
	Persentase layanan angkutan darat	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,41	31	Dinas Perhubungan
	rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66	76	Dinas Perhubungan
	Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	77,80	80	Dinas Perhubungan
	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,00	34	Dinas Perhubungan
	Persentase fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	4,17	4	Dinas Perhubungan
	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)		45,15	56,57	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	10	33	Dinas Kominfo
	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publk	Skor; Tahunan;	41,6	45	Dinas Kominfo
	Indeks SPBE	Indeks; Tahunan	2,58	2,75	Dinas Kominfo
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	Persentase Koperasi aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,37	0,38	Dinas Dag Kop UM
	UMKM yang kompetitif dan mandiri	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,26	5,8	Dinas Dag Kop UM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
13	PENANAMAN MODAL DAERAH				
	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	46,73	61,28	DPM PTSP
	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	77,61	78	DPM PTSP
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,1	0,3	Dinas Parpora
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	Dinas Parpora
	Persentase Atlet yang Berprestasi	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	65	70	Dinas Parpora
15	STATISTIK				
	Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan;	0	20	Dinas Kominfo
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan	0	10	Dinas Kominfo
	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	10	17	Dinas Kominfo
16	PERSANDIAN				
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai; Tahunan	147	272	Dinas Kominfo
17	KEBUDAYAAN				
	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Satuan, tahunan	78,5	79,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/ direhabilitasi	Satuan, tahunan	21,4	22,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase tradisi yang dikembangkan	Satuan, tahunan	50	55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	PERPUSTAKAAN				
	Persentase peningkatan pemustaka	Persen; Tahunan; IKU OPD	31.243 orang	20% (37.492 orang)	Dinas Arpus
	Persentase peningkatan koleksi judul	Persen; Tahunan; IKU OPD	23.000 judul	20% (2.500 judul)	Dinas Arpus
	Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	20% (40 perpus)	Dinas Arpus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
19	KEARSIPAN				
	Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai, Tahunan, IKU OPD	39	45	Dinas Arpus
	Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Persen, OPD dan BUMD, Tahunan, IKU OPD	0	9,62% (5 OPD)	Dinas Arpus
	Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Persen, Desa dan Ormas, Tahunan, IKU OPD	0	16,67% (2 Desa)	Dinas Arpus
	URUSAN PILIHAN				
1	PARIWISATA				
	Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.487	1.052.587	Dinas Parpora
	Rata-rata lama kunjungan wisata	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,9	0,08	Dinas Parpora
	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	22,22	66,67	Dinas Parpora
	Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70	75	Dinas Parpora
2	PERTANIAN				
	Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Range: Tahunan;			Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan	Range;Tahunan	-1,30	0,1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan	Range: Tahunan;	1,18	1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura	Range: Tahunan;	1,32	1,20	Dinas Tan KP
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range: Tahunan	101,27	101,89	Dinas Tan KP
	Indek Pertanaman	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,50	1,54	Dinas Tan KP
	Rasio serangan Organisme Pengganggu Tanaman(OPT)	Persen; Tahunan;	<3	<3	Dinas Tan KP
	Persentase Posluhdes	Persen; Tahunan;	27,56	30,66	Dinas Tan KP
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen; Tahunan;	18	23	Dinas Tan KP
	Persentase petani yang terlatih pertahun	persen; Tahunan;	2,5	2,5	Dinas Tan KP
	Persentase adopsi teknologi tepat guna	persen; Tahunan;	6	6	Dinas Tan KP
	Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	persen, tahunan	30	35	Dinas Tan KP
	Jumlah produksi daging	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.057.415	10.157.989	DKPP
	Jumlah produksi telur	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.258.158	10.360.740	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Jumlah produksi susu	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	713.890	724.599	DKPP
3	PERDAGANGAN				
	Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,73	20	Dinas Dag Kop UKM
	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	1 Pasar	Dinas Dag Kop UKM
4	PERINDUSTRIAN				
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7	7,9	Dinas Perinaker
	cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	Dinas Perinaker
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7	7,4	Dinas Perinaker
5	TRANSMIGRASI				
	persentase transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	Dinas Perinaker
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.551.423	1.566.937	DKPP
	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp (x1000); Tahunan ; IKU Program	14.459.278	14.603.871	DKPP
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.047.818	2.068.296	DKPP
	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	86.814.081	87.682.222	DKPP
	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	4.399.411	4.443.405	DKPP
	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	219.200.656	221.392.663	DKPP
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN				
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Pemerintah Desa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Pemerintahan Desa
	Persentase kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	71,28	72,53	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (<i>e-procurement</i>)	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Layanan Pengadaan
	Persentase lelang tepat waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Layanan Pengadaan
	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen, Kumulatif, IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Perekonomian
	Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	92	93	Setda Bag. Perekonomian
	Persentase pemenuhan pelayanan hubungan antar umat beragama	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Kesra
	Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Kesra
	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Humas
	Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Humas
	Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Persen; Tahunan; IKU OPD	92	93	Setda Bag. Organisasi
	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61	Setda Bag. Organisasi
	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53	Setda Bag. Organisasi
	Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Organisasi
	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Hukum
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Hukum
2	SEKRETARIAT DPRD				
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda	persen,tahunan, permendagri 86 2017	52,31	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi Legislasi dan anggaran

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD				
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	persen, tahunan, permendagri 86 tahun 2017	54,22	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi pengawasan dan kerjasama
3	KECAMATAN ADIWERNA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	9	Kec. Adiwerna
	Desa Berkembang	Jumlah;	4	7	Kec. Adiwerna
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	5	Kec. Adiwerna
4	KECAMATAN BALAPULANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	11	Kec. Balapulang
	Desa Berkembang	Jumlah;	2	6	Kec. Balapulang
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	3	Kec. Balapulang
5	KECAMATAN BOJONG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	14	Kec. Bojong
	Desa Berkembang	Jumlah;	0	1	Kec. Bojong
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Bojong
6	KECAMATAN BUMIJAWA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	16	16	Kec. Bumijawa
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	0	Kec. Bumijawa
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	2	Kec. Bumijawa
7	KECAMATAN DUKUHTURI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	11	Kec. Dukuhturi
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	4	Kec. Dukuhturi
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Dukuhturi
8	KECAMATAN DUKUHWARU				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	4	2	Kec. Dukuhwaru
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	4	Kec. Dukuhwaru
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Dukuhwaru
9	KECAMATAN JATINEGARA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	13	Kec. Jatinegara
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	3	Kec. Jatinegara
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	1	Kec. Jatinegara
10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	7	6	Kec. Kedungbanteng
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	2	Kec. Kedungbanteng
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Kedungbanteng
11	KECAMATAN KRAMAT				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	7	Kec. Kramat
	Desa Berkembang	Jumlah;	6	5	Kec. Kramat
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	7	Kec. Kramat
12	KECAMATAN LEBAKSIU				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	Kec. Lebaksiu
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	Kec. Lebaksiu
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	Kec. Lebaksiu
13	KECAMATAN MARGASARI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	9	9	Kec. Margasari
	Desa Berkembang	Jumlah;	2	2	Kec. Margasari
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Margasari

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
14	KECAMATAN PAGERBARANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	6	Kec. Pagerbarang
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	7	Kec. Pagerbarang
	Desa Mandiri	Jumlah;	0	0	Kec. Pagerbarang
15	KECAMATAN PANGKAH				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	10	Kec. Pangkah
	Desa Berkembang	Jumlah;	8	9	Kec. Pangkah
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Pangkah
16	KECAMATAN SLAWI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	0	Kec. Slawi
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	0	Kec. Slawi
	Desa Mandiri	Jumlah;	4	5	Kec. Slawi
17	KECAMATAN SURADADI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	7	6	Kec. Suradadi
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	1	Kec. Suradadi
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Suradadi
18	KECAMATAN TALANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	16	15	Kec. Talang
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	2	Kec. Talang
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Talang
19	KECAMATAN TARUB				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	14	13	Kec. Tarub
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	4	Kec. Tarub
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Tarub
20	KECAMATAN WARUREJA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	6	Kec. Warureja
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	3	Kec. Warureja
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Warureja
2	PENGAWASAN				
	Persentase penyelesaian LHP	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	91	Inspektorat
	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23	Inspektorat
	Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	18,42	Inspektorat
	Persentase APiP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,33	6,98	Inspektorat
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	97	Bappeda dan Litbang
	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	99	100	Bappeda dan Litbang
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	97	Bappeda dan Litbang
	Tingkat Kesesuaian rencana	Persen; tahunan:	82	85	Bappeda dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	dan realisasi pembangunan	Permendagri 86/2017			Litbang
	Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	83,01	85	Bappeda dan Litbang
4	KEUANGAN				
	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan	Persen; tahunan: IKU OPD	65	70	BPKAD
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen; tahunan: IKU OPD	95	100	BPKAD
	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; tahunan: IKU OPD	50	60	BPKAD
	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Tahunan	100	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	100	BP2D
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Bappeda dan Litbang
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	62,76	5,62	BKD
	Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,27	4,34	BKD
	persentase CPNS yang	Persen; Tahunan;	100	100	BKD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	Permendagri No. 86/2017			
	persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85	95,50	BKD
	persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	21,07	2,77	BKD
	persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	24,77	13,68	BKD
	persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	16,67	BKD
	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,54	0,52	BKD
C	Aspek Daya Saing				
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range: Tahunan;	101,27	101,89	Dinas Tan KP
	Nilai Investasi PMA	Rp (000.000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800	500.000	DPM dan PTSP
	Nilai Investasi PMDN	Rp (000.000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.862	850.000	DPM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks; Tahunan	80,66	82,66	Kesbangpol

Menurut kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan. Adapun jumlah Belanja Langsung pada rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp.1.297.688.893.000,00 yang terdistribusi pada 48 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Adapun rekapitulasi Belanja Langsungnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Rekapitulasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2020**

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2019	BELANJA LANGSUNG PPAS 2020	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.436.853.000	228.434.630.000	8.997.777.000	4,10
2	Dinas Kesehatan	185.652.418.000	192.932.813.000	7.280.395.000	3,92
3	RSUD Dr Soeselo	155.737.970.000	143.570.840.000	(12.167.130.000)	(7,81)
4	RSUD Suradadi	47.600.000.000	49.045.000.000	1.445.000.000	3,04
5	Dinas Pekerjaan Umum	211.448.186.000	221.695.000.000	10.246.814.000	4,85
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	87.828.250.000	94.856.000.000	7.027.750.000	8,00
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.592.922.000	1.515.593.000	(77.329.000)	(4,85)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.783.544.000	7.943.400.000	159.856.000	2,05
9	Dinas Sosial	4.847.174.000	7.130.870.000	2.283.696.000	47,11
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.574.181.000	11.706.031.000	1.131.850.000	10,70
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.296.282.000	32.613.000.000	14.316.718.000	78,25
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.474.614.000	7.026.922.000	552.308.000	8,53
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.222.580.000	7.025.000.000	(1.197.580.000)	(14,56)
14	Dinas Perhubungan	23.784.699.000	15.456.500.000	(8.328.199.000)	(35,01)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.965.360.000	20.739.100.000	16.773.740.000	423,01
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.492.000.000	2.901.000.000	(591.000.000)	(16,92)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.835.840.000	6.073.060.000	4.237.220.000	230,81
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	7.058.314.000	7.552.500.000	494.186.000	7,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.587.610.000	19.050.000.000	6.462.390.000	51,34
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.275.535.000	28.868.803.000	(3.406.732.000)	(10,56)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.082.388.000	14.981.381.000	(1.101.007.000)	(6,85)
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.485.410.000	17.525.000.000	4.039.590.000	29,96
23	Sekretariat Daerah	22.099.743.000	23.545.000.000	1.445.257.000	6,54
24	Sekretariat DPRD	21.732.980.000	18.960.000.000	(2.772.980.000)	(12,76)
25	Kecamatan Adiwerna	560.648.000	1.000.000.000	439.352.000	78,37
26	Kecamatan Balapulang	396.901.000	1.000.000.000	603.099.000	151,95

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2019	BELANJA LANGSUNG PPAS 2020	JUMLAH	%
27	Kecamatan Bojong	491.648.000	1.037.000.000	545.352.000	110,92
28	Kecamatan Bumijawa	510.398.000	957.750.000	447.352.000	87,65
29	Kecamatan Dukuhturi	636.959.000	1.000.000.000	363.041.000	57,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	495.558.000	1.000.000.000	504.442.000	101,79
31	Kecamatan Jatinegara	460.898.000	955.750.000	477.352.000	110,92
32	Kecamatan Kedungbanteng	479.058.000	868.290.000	389.232.000	81,25
33	Kecamatan Kramat	2.226.628.000	2.060.050.000	(166.578.000)	(7,48)
34	Kecamatan Lebaksiu	547.188.000	1.000.000.000	452.812.000	82,75
35	Kecamatan Margasari	562.531.000	1.000.000.000	437.469.000	77,77
36	Kecamatan Pagerbarang	683.820.000	1.055.000.000	371.180.000	54,28
37	Kecamatan Pangkah	585.148.000	1.300.000.000	714.852.000	122,17
38	Kecamatan Slawi	11.254.946.000	9.660.000.000	(1.594.946.000)	(14,17)
39	Kecamatan Suradadi	521.898.000	991.810.000	469.912.000	90,04
40	Kecamatan Talang	696.148.000	1.000.000.000	303.852.000	43,65
41	Kecamatan Tarub	495.145.000	1.150.000.000	654.855.000	132,26
42	Kecamatan Warurejo	592.148.000	962.550.000	370.402.000	62,55
43	BPBD	2.978.000.000	4.155.500.000	1.177.500.000	39,54
44	Inspektorat	3.744.500.000	5.717.000.000	1.972.500.000	52,68
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.426.500.000	10.303.250.000	1.876.750.000	22,27
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.720.925.000	49.723.000.000	(1.997.925.000)	(3,86)
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.393.040.000	9.654.500.000	3.261.460.000	51,02
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah	9.940.150.000	8.990.000.000	(950.150.000)	(9,56)
	JUMLAH	1.229.295.636.000	1.297.688.893.000	68.393.257.000	5,56

3.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terbagi kedalam jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.664.316.120.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.1.080.000.000,00 (64,89%), Belanja Hibah Rp.48.120.800.000,00 (2,89%), Belanja Bantuan Sosial Rp.14.350.000.000,00 (0,86%), Belanja Bagi Hasil Rp.22.000.000.000,00 (1,32%), Belanja Bantuan Keuangan Rp.493.845.320.000,00 (29,67%), dan Belanja Tidak Terduga Rp.6.000.000.000,00 (0,36%).

Tabel 3.4. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2019	BELANJA TIDAK LANGSUNG PPAS TA 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.064.067.239.000	1.080.000.000.000	15.932.761.000	1,50
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	35.157.800.000	48.120.800.000	12.963.000.000	36,87
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.826.400.000	14.350.000.000	(8.476.400.000)	(37,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10.029.933.000	22.000.000.000	11.970.067.000	119,34
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	499.386.475.000	493.695.320.000	(5.691.155.000)	(1,14)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
	JUMLAH	1.581.068.842.000	1.664.316.120.000	26.848.273.000	1,64

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp.2.962.005.813.000,00 Jumlah tersebut lebih besar 0,95% atau Rp.27.781.644.000,00 dari rencana target pendapatan daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, berdasarkan Program/Kegiatan dan berdasarkan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Jumlah Belanja Langsung	1.297.688.893.000	
	Belanja Administrasi Umum		
	Belanja Administrasi Umum 48 OPD	139.840.068.000	
	Belanja Langsung Urusan Wajib		
1.	Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.157.848.825.000	
1	Urusan Pendidikan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.610.130.000	
2	Urusan Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	187.018.313.000	
	RSUD Dr Soeselo	141.419.870.000	
	RSUD Suradadi	48.050.000.000	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum	216.775.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	3.950.000.000	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	88.896.000.000	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
	Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	970.000.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.740.000.000	
	BPBD	3.006.000.000	
6	Urusan Sosial		
	Dinas Sosial	4.615.870.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
2.	Belanja Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.595.000.000	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.375.000.000	
3	Urusan Pangan		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.355.000.000	
4	Urusan Pertanahan		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	3.950.000.000	
5	Urusan Lingkungan Hidup		
	Dinas Lingkungan Hidup	31.661.000.000	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.576.922.000	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.990.000.000	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.189.531.000	
9	Urusan Perhubungan		
	Dinas Perhubungan	13.665.000.000	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.432.000.000	
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.520.000.000	
12	Urusan Penanaman Modal		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.563.000.000	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.252.000.000	
14	Urusan Statistik		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.554.787.000	
15	Urusan Persandian		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.203.813.000	
16	Urusan Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.865.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
17	Urusan Perpustakaan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.900.000.000	
18	Urusan Kearsipan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.150.000.000	
3.	Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan perikanan		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	3.981.000.000	
2	Urusan Pariwisata		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.312.000.000	
3	Urusan Pertanian		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.700.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.119.803.000	
4	Urusan Perdagangan		
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.660.000.000	
5	Urusan Perindustrian		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.453.000.000	
6	Urusan Transmigrasi		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.000.000	
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Urusan Pemerintahan		
	Sekretariat Daerah	10.675.000.000	
	Sekretariat DPRD	15.130.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.846.216.000	
2	Urusan Pengawasan		
	Inspektorat	2.205.000.000	
3	Urusan Perencanaan Pembangunan		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.790.000.000	
4	Urusan Keuangan		
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.125.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.660.000.000	
5	Urusan Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	7.740.000.000	

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :